

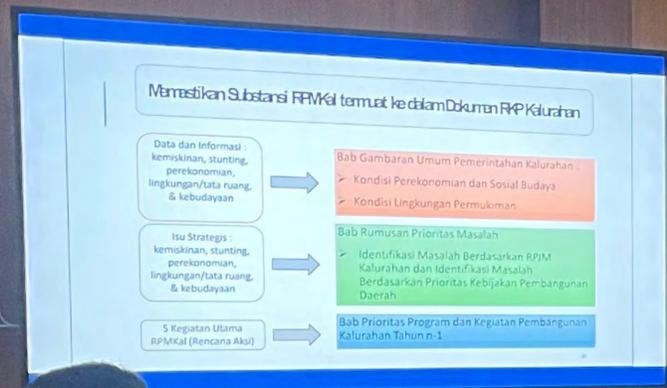


Focus Group Discussion  
RKPD Kab Sleman Tahun 2027  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

oleh: Dr. Nur Widiastuti, SE., M.Si

Kabupaten Sleman  
Agustus 2025





Focus Group Discussion  
RKPD Kab Sleman Tahun 2027  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

oleh: Dr. Nur Widiastuti, SE., M.Si

Bappeda Kab Sleman  
Selasa 26 Agustus 2025

# Isu Global 2025

- **Pergeseran Geopolitik yang Muncul**
- **Tatanan Dunia Multilateral: India, Tiongkok, AS, Uni Eropa**
- **Keberlanjutan Lingkungan dan Perubahan Iklim**
- Kesehatan Global
- Kemajuan Teknologi
- Keamanan Siber dan Privasi Data
- Media Sosial dan Disinformasi
- Hak Asasi Manusia dan Tatakelola
- **Ketimpangan Ekonomi dan Pergeseran Demografi**

# Kemajuan Teknologi (Teknologi 5G)

Memungkinkan konektivitas yang lebih cepat, mengubah jaringan komunikasi, meningkatkan kemampuan Internet of Things (IoT),

Komputasi kuantum (mendorong terobosan di berbagai bidang teknologi dan sains serta pemecahan masalah yang kompleks),

Teknologi blockchain (merevolusi manajemen rantai pasok, keamanan data, dan transaksi keuangan), pemanfaatan teknologi berkelanjutan (memajukan sumber energi terbarukan, solusi pengurangan limbah, dan proses manufaktur ramah lingkungan),

kemajuan teknologi baru seperti AI (mendorong inovasi dan efisiensi), terobosan dalam keanekaragaman hayati (peningkatan pengembangan layanan kesehatan dan kemajuan rekayasa genetika),

diversifikasi aplikasi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) di industri lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dll., selain hiburan dan gim, kendaraan otonom (membentuk kembali dan merevolusi cara orang bepergian dan sistem transportasi, memengaruhi industri layanan kesehatan, perencanaan kota, dll., inovasi dalam manajemen data, interaksi manusia-mesin, dan manajemen data), serta memajukan teknologi eksplorasi ruang angkasa.

# Keamanan Siber dan Privasi Data

- Seiring navigasi dunia yang semakin terhubung, privasi data dan keamanan siber akan menjadi perhatian penting.
- Digitalisasi yang cepat pada perusahaan dan bisnis, meningkatnya kecanggihan ancaman siber, dan maraknya perangkat IoT telah menandai permintaan akan strategi proaktif dan adaptif untuk melindungi data dan informasi sensitif.
- Beberapa aspek yang menjadi fokus pada tahun 2025 meliputi Pertahanan Siber berbasis AI, arsitektur zero trust, teknologi peningkatan privasi, dan kriptografi yang aman kuantum.
- Tren yang muncul seperti regulasi privasi, munculnya platform Ransomware-as-a-Service (RaaS), dan tantangan keamanan 5G akan tetap signifikan.
- Perpaduan kemajuan teknologi dan lanskap ancaman yang terus berkembang akan membutuhkan strategi keamanan siber dan privasi data yang holistik dan tangguh.

# Isu Ekonomi di Indonesia

- perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pelemahan konsumsi domestik, penurunan investasi, dan ketidakpastian global.
- Pemerintah menghadapi tantangan pengelolaan fiskal dan diperlukan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memastikan pertumbuhan yang inklusif di tengah ketimpangan kekayaan yang ada.

# Isu DIY 2025

## **Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Hidup:**

- Isu kemiskinan, pelayanan kesehatan yang belum optimal, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan hunian layak .

## **Peningkatan Kualitas SDM:**

- Terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

## **Pemberdayaan Masyarakat:**

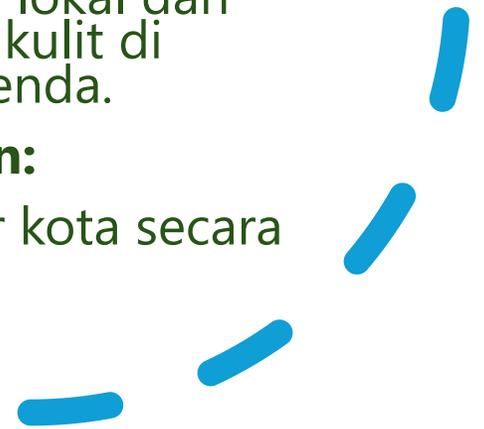
- Penguatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan mendukung pembangunan inklusif.

## **Peningkatan Kemandirian Ekonomi:**

- Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan sentra industri seperti industri kulit di Manding dan Keparakan juga menjadi agenda.

## **Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan:**

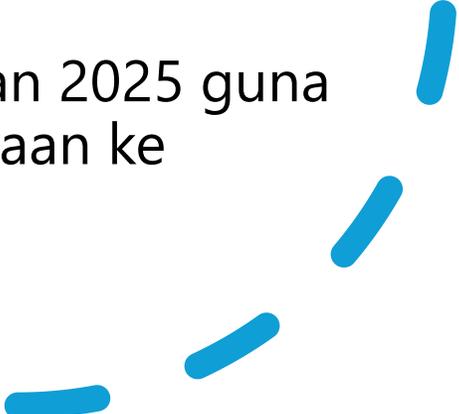
- Ditekankan pula pengelolaan infrastruktur kota secara berkelanjutan.



# Isu Kebijakan dan Pemerintah

- **Reformasi Kalurahan:**
  - Inisiatif untuk mereformasi kalurahan dengan mendasarkan pada potensi unik, kearifan lokal, serta mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan.
  - **Peningkatan Layanan Publik:**
  - Komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik menuju pemerintahan yang baik (good government).
  - **Sinergi Kebijakan:**
  - DPRD dan Pemkot/Pemkab menyepakati arah kebijakan pembangunan 2025-2029 untuk mencapai pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif.
- 

# Isu Sosial dan budaya

- **Penguatan Keluarga:**
  - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 mengusung tema "Dari Keluarga untuk Indonesia Maju" untuk memperkuat nilai-nilai keluarga khas DIY dan mendorong pengasuhan anak sejak dini.
  - **Literasi Keuangan:**
  - Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) untuk membentuk masyarakat yang cerdas finansial.
  - **Refleksi Kebudayaan:**
  - Inisiatif dari budayawan Jogja untuk menyelenggarakan Refleksi Kebudayaan 2025 guna membahas strategi kemajuan kebudayaan ke depan.
- 

# Isu Pariwisata dan Industri

## **Pengembangan Destinasi Pariwisata:**

- Potensi pengembangan wisata buatan di pinggiran kota, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, dan festival untuk menambah daya tarik wisatawan.

## **Peningkatan Daya Saing Industri:**

- Program penguatan industri untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ekspor.

## **Perdagangan Luar Negeri:**

- Upaya mengatasi hambatan tarif ekspor ke Amerika Serikat dan memperkuat peran DIY dalam perdagangan internasional.
- 

# PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Koperasi Merah Putih
- Reformasi Birokrasi Kelurahan
- Reformasi Pemberdayaan Masyarakat
- Posyandu Versi Baru
- Pelaksanaan pemilihan lurah 2028 dan 2029
- Masih terdapat kalurahan yang belum membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
- Terdapat pengelola BUMKal yang belum memahami regulasi, pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMKal
- Indeks Desa ketika sudah 100% mandiri

# PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Masih terdapat kalurahan yang belum menyelesaikan siklus tahunan desa tepat waktu. Siklus tahunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengaturan
- Belum optimalnya pemutakhiran data profil desa dan kesulitan data yang valid tentang profil kalurahan
- Pengelolaan pasar desa belum berjalan dengan baik, dari 35 pasar desa baru 48,57% yang berpredikat baik
- Masih terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terfasilitasi
- Belum optimalnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dalam kegiatan yang ada di kalurahan dan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

# PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang belum optimal.
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa
- Kompetensi aparatur kalurahan dalam memahami ketugasan belum optimal
- Masih kurangnya kesadaran pemerintah desa dalam menyelesaikan siklus tahunan desa tepat waktu
- Belum maksimalnya laporan tahunan desa
- Adanya kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah pusat terkait dengan regulasi
- Terlambatnya / tidak tepatnya penetapan / pengesahan regulasi tentang pelaksanaan Pilkades secara elektronik sehingga melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pilkades secara elektronik mundur dari jadwal yang sudah ditentukan

# PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pemahaman ketugasan maupun penguasaan teknologi informasi.

Masih kurangnya pemahaman perangkat desa tentang tambahan kewenangan desa dalam keistimewaan

Belum optimalnya pengelolaan SPAMdes dan sanitasi

Banyaknya sistem informasi yang harus dikerjakan desa

# KOPERASI MERAH PUTIH

# Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi merah Putih ada 3 Macam.

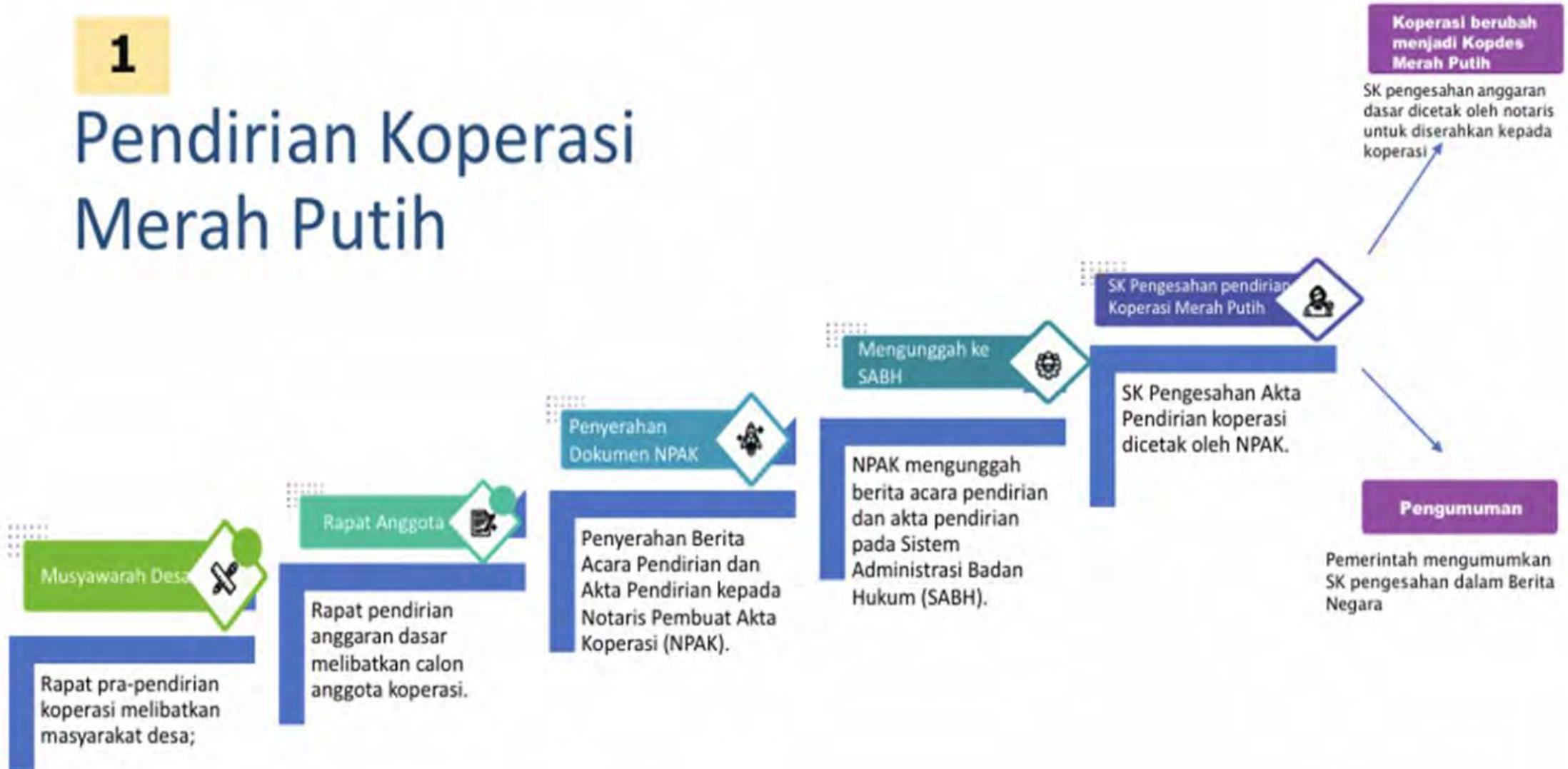
- Pertama, koperasi yang baru didirikan untuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
- Kedua, koperasi yang sudah ada dengan kinerja baik dan diubah menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
- Ketiga, koperasi yang tidak aktif akan direvitalisasi untuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih.

Untuk menentukan model koperasi, proses ini dilakukan melalui musyawarah desa yang diadakan oleh kepala desa, agar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.

# PENDIRIAN BARU

1

## Pendirian Koperasi Merah Putih



# PENGEMBANGAN KOPERASI YG SUDAH ADA

2

## Pengembangan Koperasi Yang Sudah Ada



# 3. REVITALISASI KOPERASI

## 3 Revitalisasi Koperasi



## Tujuan dari didirikannya Koperasi Merah Putih :

- 1. Memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
- 2. Menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
- 3. Mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, cold storage, dan logistik desa.

# MANFAAT KOPERASI MERAH PUTIH



**JENIS USAHA  
YANG DIKELOLA  
KOPERASI DESA  
MERAH PUTIH**

Outlet gerai sembako;

Outlet gerai obat murah/ apotek desa;

Outlet kantor koperasi;

Outlet koperasi simpan pinjam;

Outlet klinik desa;

Outlet Cold Storage/ cold chain;

# 5 ISU KPM

Skala ekonomi

Kapasitas SDM

Elite capture (penguasaan oleh elit local)

Resiko kecurangan (fraudulent)

Keberlanjutan (sustainability)

# Kendala dan Tantangan Koperasi Merah Putih

potensi korupsi dan penyelewengan dana,

tumpang tindih dengan BUMDes,

rendahnya kapasitas SDM dan literasi keuangan,

masalah pendanaan yang rentan kredit macet,

keterbatasan infrastruktur fisik,

isu politisasi,

serta risiko ketidakberlanjutan program

# Koperasi satu pihak dan multi pihak

KOPERASI SATU PIHAK		KOPERASI MULTI PIHAK	
Keunggulan	Keterbatasan	Keunggulan	Tantangan
1. Fokus pada kebutuhan spesifik anggotanya.	1. Sumber modal terbatas dari simpanan anggota dan pinjaman	1. Sumber modal, informasi dan keterampilan lebih beragam	1. Pengelolaan yang lebih kompleks
2. Anggota memiliki kepentingan yang sama	2. Ketergantungan pada satu kelompok	2. Ekosistem bisnis lebih kuat	2. Potensi konflik kepentingan
3. Pengambilan keputusan yang lebih mudah	3. Sulit memperkuat ekosistem bisnis	3. Lebih tahan terhadap resiko	3. Regulasi dan legalitas yang lebih rumit
4. Struktur lebih sederhana	4. Daya tahan terhadap risiko rendah	4. Terbuka pada inovasi yang lebih flexible	4. Perlu management profesional

# Bum Desa dan Koperasi

## PERBANDINGAN BUM DESA DAN KOPERASI (1)

ASPEK	BUM DESA	KOPERASI
Prakarsa pembentukan	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kumpulan orang per orang;</li><li>• Tidak dibatasi wilayah Desa tertentu.</li></ul>
Prosedur	Musyawarah Desa (diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa)	Rapat Anggota
Keabsahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa (disepakati bersama antar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa)</li><li>• Keputusan Kepala Desa tentang AD/ART BUM Desa</li></ul>	Akte Notaris
Pihak pengesah	Kepala Desa	Notaris
Institusi tertinggi	Musyawarah Desa	Rapat Anggota
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan hukum publik;</li><li>• Unit Usaha yang dibentuk BUM Desa dapat berbentuk badan hukum privat</li></ul>	Badan hukum privat
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa setempat;</li><li>• Mendayagunakan sumber ekonomi lokal skala Desa.</li></ul>	Mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan Anggota.
Layanan	Pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi Desa setempat;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Institusi dan gerakan ekonomi rakyat;</li><li>• Terbuka lintas-desa.</li></ul>

# Bum Desa dan Koperasi

## PERBANDINGAN BUM DESA DAN KOPERASI (2)

ASPEK	BUM DESA	KOPERASI
Modal Pendirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekayaan Desa yang dipisahkan;</li> <li>Terbuka penyertaan Modal dari masyarakat Desa setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Simpanan pokok dan wajib dari Anggota;</li> <li>Terbuka penyertaan modal dari pihak lain.</li> </ul>
Basis layanan	Potensi aset Desa setempat (ekonomi Desa, sumber daya alam, layanan dasar)	Kehendak, kebutuhan, kesepakatan anggota.
Bagi hasil	Pendapatan Asli Desa.	Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota.
Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerja sama antar-Desa untuk membentuk BUM Desa Bersama;</li> <li>Peleburan, penggabungan BUM Desa untuk BUM Desa Bersama;</li> <li>Kerja sama antar Unit Usaha BUM Desa.</li> </ul>	Kerja sama antarkoperasi dan institusi usaha lainnya.
Pelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama;</li> <li>Perjanjian kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak ketiga (koperasi, korporasi, dll).</li> </ul>	Kesepakatan/perjanjian kerja sama usaha dengan institusi usaha lainnya.
Peluang Kerja Sama	Kegiatan usaha bersama (bukan Penyertaan Modal) antara BUM Desa, Koperasi, dan institusi melalui Hibah dari Pemerintah Desa, disepakati di Musyawarah Desa.	Koperasi di Desa yang masih aktif, hadir dalam Musyawarah Desa, untuk membahas kegiatan usaha bersama dengan BUM Desa.

- Model koperasi modern yang memungkinkan berbagai kelompok pemangku kepentingan(stakeholder) untuk bergabung menjadi anggota. Kelompok-kelompok ini dapat terdiri dari produsen, konsumen, pekerja, investor, dan pihak-pihaklain yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu usaha.
- Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

# Asta Cita untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045".

## **1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

## **2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional**

Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama system persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.

## **3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan**

Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

## **4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender**

Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

# Asta Cita untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045".

## **5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi**

- Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

## **6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi**

- Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.

## **7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba**

- Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.

## **8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama**

- Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.